

Dynamic Governance Pada Pengelolaan Informasi Publik Di Provinsi Riau

¹Resa Vio Vani, Meyzi Heriyanto, Mayarni Mayarni

¹Universitas Riau, Indonesia; Resavani31@gmail.com

Received: March 28, 2023; In Revised: April 25, 2023; Accepted: May 30, 2023

Abstract

The background of this research is that public information management is a process that involves collecting, storing, processing, and disseminating information owned by the government or public institutions to the public in a transparent and accountable manner using dynamic governance theory indicators. This becomes important to analyze when there are rampant corruption cases and declining bureaucratic performance, especially in the Riau provincial government. The aims of this study were to identify the existing conditions of public information management in Riau Province, to analyze the form of Dynamic Governance in public information management in Riau Province, and to identify the challenges of public information management in Riau Province. This is done using qualitative research methods that aim to elaborate a deeper discussion. Therefore, the results of the study state that Riau Province has succeeded in properly managing public information in accordance with applicable rules and procedures. The Information and Documentation Management Officer as the main manager of public information in the regions, the Department of Communication, Information, and Technology of Riau Province, and the Information Commission play an important role in ensuring that public information services are transparent and can be accessed online by the public. The application of Dynamic Governance in the management of public information in Riau Province has been successful and has had a positive impact. Analysis of the Culture, Capabilities, and Change indicators shows significant changes in the management of public information, which makes it more transparent and easily accessible to the public. However, there are several challenges faced in managing public information in Riau Province.

Keywords: *Dynamic Governance, Local Government, Public Information Management.*

Pendahuluan

Pemerintahan yang dinamis (*Dynamic Governance*) menjadi sebuah kapabilitas yang strategis yang perlu dimiliki oleh Pemerintah di berbagai Negara di dunia saat ini. Perubahan berbagai sektor dan aspek kehidupan pada akhirnya melahirkan berbagai tuntutan kepada pemerintah untuk dapat meresponnya secara lebih efektif dan efisien. *Dynamic Governance* menjadi landasan penting dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan Pemerintah yang adaptif dan responsive terhadap perubahan lingkungan. Kemampuan ini menjadi faktor esensial dalam konteks upaya Pemerintah mewujudkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, salah satunya dalam aspek pengelolaan informasi publik (Rahmatunnisa, 2019). Informasi publik penting karena memberikan akses pada masyarakat untuk memperoleh pengetahuan yang diperlukan dalam membuat keputusan yang bijaksana dan

mempengaruhi kebijakan pemerintah. Hal ini didukung oleh *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)* menyatakan bahwa hak atas informasi publik adalah bagian penting dari hak asasi manusia dan merupakan prasyarat untuk partisipasi aktif warga dalam kehidupan publik dan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Informasi publik juga dapat berperan dalam mencegah terjadinya korupsi dan memajukan demokrasi yang sehat. Menurut para ahli, jika pengelolaan informasi publik tidak transparan, dapat terjadi beberapa dampak negative, di antaranya yaitu menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga public, meningkatnya tingkat korupsi, tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat, dan terjadinya penyimpangan dan pelanggaran hukum.

Pendistribusian informasi publik di *Website* resmi pemerintah daerah adalah bentuk atau upaya pemerintah dalam mencegah dan/atau meminimalisir korupsi, karena dengan pengelolaan informasi publik dengan baik diyakini dapat meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap pemerintah melalui kebebasan akses oleh publik dalam memperoleh informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan dan akan sulit dilakukannya manipulasi data. Korupsi merupakan salah satu permasalahan terbesar dalam pengelolaan keuangan negara. Untuk tingkat daerah, sebagai bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencegah korupsi dengan memaksimalkan transparansi informasi keuangan daerah. Dengan lahirnya undang - undang no 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang mengintruksikan bahwa setiap badan publik (Daerah/Pusat) agar mempublikasikan segala program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Salah satu kondisi eksisting yang mendukung pernyataan ini adalah bahwa setelah hari Anti korupsi pada tahun 2016 pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Riau masih dikategorikan belum melakukan pembenahan yang baik terhadap tata kelola pemerintahn daerahnya. Terlihat ditemukannya beberapa daerah Kabupaten/Kota yang bermasalah dengan KPK. Diantaranya ditemukannya kasus tahun 2015 terjadi kasus korupsi yang menjerat mantan Gubernur Riau Annas Maamun terkait kasus korupsi alih fungsi lahan kelapa sawit. Tahun 2022 mantan Gubernur Riau Annas Maamun kembali terjerat kasus kasus korupsi. Kali ini Aanaas Maamun Gubernur Riau periode 2014-2019 kembali ditahan terkait kasus dugaan suap pengesahan RAPBD-P tahun anggaran 2014 dan/atau RAPBD tahun anggaran 2015 Provinsi Riau (Andryanto 2022).

Tabel 1
Bentuk Informasi Publik di Provinsi Riau

Teori Kurniawan (2020) mengenai Bentuk Transparansi Pemerintahan, yaitu:	Informasi
<p>1. Informasi Publik</p> <p>Informasi yang bisa di buka oleh publik di situs resmi pemerintahan (<i>Website Pemerintah</i>)</p>	<p>a. Profil OPD; Struktur OPD; Target Pendapatan Daerah; Regulasi; Surat Edaran; Renstra; Renja; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah); Peta Jabatan; Rencana Program/Kegiatan Prioritas; Indikator Kinerja Utama OPD; Informasi Gedung dan Ruang; Statistik Data Pegawai; Perjanjian Kinerja; Laporan Keuangan OPD; Pencairan Bantuan Keuangan; Data ases bangunan dan gedung Pemerintah Provinsi Riau); Data informasi publik masing – masing OPD yang bisa di akses oleh masyarakat; Informasi umum (upah minimum, jumlah dan potensi kecamatan/kelurahan/desa, dan daftar informasi publik, pajak, dan lainnya).</p>
<p>2. Informasi yang dikecualikan oleh publik</p> <p>informasi yang tidak boleh diakses oleh publik, bukan konsumsi publik karena akan mengakibatkan ancaman keamanan bagi Pemerintah/Negara</p>	<p>a. Bidang persandian KOMINFO Provinsi Riau (Berdasarkan lembar pengujian konsekuensi nomor 1 tahun 2022)</p> <p>b. Informasi topologi jaringan komunikasi dan manajemen data center seperti: lokasi server, IP address private, manajemen, keamanan server, akses password (Berdasarkan lembar pengujian konsekuensi nomor 1 tahun 2021)</p> <p>c. Informasi pengelolaan infrastruktur TIK (Berdasarkan lembar konsekuensi nomor 2 tahun 2022)</p> <p>d. Dan informasi dikecualikan oleh masing – masing OPD lainnya berdasarkan lembar konsekuensi yang legal.</p>

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa terdapat dua informasi yang dapat dibagikan oleh publik yaitu informasi publik dan Informasi yang dikecualikan oleh publik. Informasi publik yaitu informasi yang bisa di buka oleh publik di situs *Website*, sementara informasi yang dikecualikan oleh publik yaitu informasi yang memang tidak boleh diakses oleh publik karena tidak untuk konsumsi publik yang dikarenakan apabila disebarluaskan oleh publik akan mengakibatkan ancaman keamanan bagi Pemerintah Provinsi Riau.

Tabel 1

Ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau di Website Resmi Pemerintah

No	Provinsi Riau Kabupaten/Kota	Ada	Tidak Ada
1	Pekanbaru		√
2	Dumai	√	
3	Siak		√
4	Rokan Hulu		√
5	Rokan Hilir		√
6	Pelalawan		√
7	Kuantan Singingi	√	
8	Kepulauan Meranti		√
9	Kampar		√
10	Indragiri Hilir		√
11	Indragiri Hulu	√	
12	Bengkalis		√

Sumber: Provinsi Riau dalam Angka, 2022

Berdasarkan tabel 2 dapat terlihat Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Riau hanya Dumai, Kepulauan Meranti dan Indragiri Hilir yang menyediakan informasi dokumen APBD T.A 2020. Selebihnya Kota Pekanbaru, Siak, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Palalawan, Kepulauan Meranti, Kampar, Indragiri Hulu dan Bengkalis, tidak menyediakan informasi dokumen APBD dalam *Website* resmi masing-masing Pemerintahan Daerahnya. Selain itu juga terdapat jenis-jenis informasi yang berbeda yang tersedia secara daring oleh PPID Provinsi Riau. Berikut adalah jumlah informasi untuk setiap jenis. Berdasarkan fenomena pengelolaan informasi publik di Provinsi Riau, pada tahun 2021 hingga 2022 Provinsi Riau berhasil meraih peringkat Badan Publik Pemerintah Daerah Informatif dari Komisi Informasi Pusat. PPID Provinsi Riau dapat memantau dan memastikan bahwa informasi yang tersedia mencakup berbagai jenis dan memenuhi kebutuhan informasi yang beragam dari masyarakat. Data menunjukkan bahwa ada 2 informasi yang dikecualikan.

Dalam konteks pengelolaan informasi publik, penting untuk memahami alasan di balik pengecualian informasi tersebut. Meskipun jumlah informasi yang dikecualikan relatif kecil, PPID Provinsi Riau perlu memastikan kepatuhan dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk pengecualian informasi dan menjelaskan alasan yang jelas kepada masyarakat yang didukung oleh kehadiran Komisi Informasi Provinsi Riau. Selain itu Data juga memberikan gambaran tentang perbandingan jumlah informasi antara jenis yang berbeda. Informasi berkala memiliki jumlah tertinggi (199 informasi), diikuti oleh informasi yang tersedia setiap saat (174 informasi), dan informasi serta merta (41 informasi). Ini dapat memberikan wawasan tentang fokus dan

prioritas PPID Provinsi Riau dalam pengelolaan dan penyediaan informasi publik yang aktual dan berkala kepada masyarakat. Maka dalam memperkuat analisis ini berikut gambar rasio permohonan informasi secara daring di PPID Provinsi Riau.

Rasio Permohonan Informasi yang Selesai: Jumlah Permohonan Informasi Selesai dibagi dengan Jumlah Permohonan Informasi dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana PPID Provinsi Riau berhasil menangani permohonan informasi. Dalam hal ini, rasio tersebut dapat dihitung sebagai berikut: Rasio Permohonan Informasi yang Selesai = Jumlah Permohonan Informasi Selesai dibagi Jumlah Permohonan Informasi = $89 / 317 = 0,28$ atau 28%. Dengan demikian, sekitar 28% permohonan informasi telah diselesaikan oleh PPID Provinsi Riau. Selain itu Rasio Download Informasi: Jumlah Download Informasi dibagi dengan Jumlah Member dapat memberikan indikasi tentang seberapa banyak informasi yang diakses oleh setiap anggota yang terdaftar. Rasio ini dapat dihitung sebagai berikut: Rasio Download Informasi = Jumlah Download Informasi dibagi Jumlah Member = $275 / 405 = 0,68$ atau 68%, ini berarti rata-rata setiap anggota telah mengunduh sekitar 68% dari total informasi yang tersedia. Dan terakhir Rasio Permohonan Informasi Daftar Informasi Publik: Rasio ini dapat memberikan gambaran tentang seberapa sering masyarakat mengajukan permohonan informasi dibandingkan dengan jumlah informasi yang tersedia. Rasio ini dapat dihitung sebagai berikut: Rasio Permohonan Informasi per Daftar Informasi Publik = Jumlah Permohonan Informasi dibagi Daftar Informasi Publik = $317 / 416 = 0,76$ atau 76%. Dengan demikian, rata-rata setiap informasi dalam Daftar Informasi Publik menerima sekitar 76% permohonan informasi. Data yang diberikan mencerminkan beberapa aspek pengelolaan informasi publik di PPID Provinsi Riau secara daring. Berikut adalah hubungan data ini dengan pengelolaan informasi publik di Riau:

1. Tingkat Penyelesaian Permohonan Informasi: Data menunjukkan bahwa sekitar 28% permohonan informasi telah diselesaikan oleh PPID Provinsi Riau. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efisiensi dan kualitas pengelolaan permohonan informasi di PPID tersebut. Semakin tinggi persentase penyelesaian, semakin baik pula kinerja PPID dalam memenuhi permohonan informasi publik.
2. Tingkat Akses dan Penggunaan Informasi: Rata-rata setiap anggota telah mengunduh sekitar 68% dari total informasi yang tersedia. Ini mengindikasikan bahwa anggota masyarakat yang terdaftar di PPID Provinsi Riau secara aktif mengakses dan memanfaatkan informasi yang disediakan. Tingkat pengunduhan yang tinggi dapat menunjukkan tingkat kepuasan dan kebutuhan akan informasi publik di kalangan pengguna.
3. Permintaan Informasi terhadap Jumlah Informasi yang Tersedia: Rata-rata setiap informasi dalam Daftar Informasi Publik menerima sekitar 76% permohonan informasi di *Website* resmi PPID Provinsi Riau. Ini dapat mengindikasikan bahwa ada sejumlah informasi yang lebih banyak diminati dan diminta oleh masyarakat daripada informasi lainnya. Hal ini dapat memberikan masukan kepada PPID Provinsi Riau untuk memprioritaskan pengelolaan dan penyebaran informasi yang paling diminati oleh masyarakat.

Dalam keseluruhan, data tersebut dapat memberikan gambaran tentang kinerja PPID Provinsi Riau dalam pengelolaan informasi publik secara daring. Hal ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memantau dan meningkatkan pelayanan informasi publik, meningkatkan efisiensi penyelesaian permohonan informasi, memastikan akses yang baik terhadap informasi yang tersedia, dan mengidentifikasi informasi yang paling diminati oleh masyarakat guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah di Provinsi Riau. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pengelolaan informasi publik adalah proses yang melibatkan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyebaran informasi yang dimiliki oleh pemerintah atau lembaga publik kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel. Maka dari itu pengelolaan informasi publik dipertegas dengan diterbitkannya beberapa peraturan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan melalui pengelolaan informasi publik yang baik. Bentuk pengelolaan ini dapat dilihat melalui teori Neo dan chen [4] yang menulis landasan bahwa *Dynamic Governance* adalah budaya kelembagaan suatu negara yang ditunjukkan dengan tiga faktor kemampuan dinamis (*dynamic capabilities*) yaitu berpikir ke depan (*Thinking Ahead*), berpikir kembali (*Thinking Again*), dan berpikir sepanjang mengarah kepada pelaksanaan kebijakan yang adaptif (*Thinking Across*). Ada faktor penguangkit utama untuk mengembangkan *Dynamic Governance* yaitu orang yang cakap (*Able People*) diisi oleh orang-orang yang cerdas, gesit, dan tangkas (*agile people*). Namun pengaruh yang menjadi perhatian serius adalah faktor lingkungan eksternal (*external environment*). Maka dari itu penelitian ini merupakan analisis pengelolaan informasi publik di Provinsi Riau melalui perspektif *Dynamic Governance* sebagai bentuk lain dari pengembangan pemahaman ilmu Pemerintahan dan metode administrasi publik modern.

State of art penelitian dianalisis melalui, Pertama ialah identifikasi kesenjangan dalam penelitian terdahulu yaitu analisis penggunaan teori *Dynamic Governance* yang belum menyeluruh hingga indikator *Culture* dan *Change*, sehingga elaborasi permasalahan belum maksimal menghasilkan bentuk kebijakan yang adaptif dan keterhubungan realisasi kebijakan dalam menghasilkan perubahan signifikan. Kedua yaitu urgensi penelitian ini dalam menjawab saran dan keberlanjutan penelitian terdahulu, dengan melakukan analisis kualitatif melalui konsep *Dynamic Governance* untuk mendeskripsikan kemungkinan ketercapaian kebaruaran yang diharapkan dalam pengelolaan informasi publik, yaitu: Penerapan teknologi informasi; Peningkatan keterbukaan informasi; Peningkatan partisipasi publik; Pengelolaan data yang efektif; dan Pengawasan dan evaluasi.

Dilatarbelakangi oleh urgensi pengelolaan informasi publik oleh pemerintahan yang tergabung dalam PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Provinsi Riau, terdiri dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Provinsi Riau, serta peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, dan Komisi Informasi Provinsi Riau berlandaskan pada maklumat pelayanan yaitu setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengelolaan informasi publik pemerintahan Provinsi Riau.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif dalam menganalisa tujuan penelitian dan melakukan klasifikasi kecocokkan untuk menemukan jawaban penelitian, Penelitian kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks dan kompleksitas pengelolaan informasi publik di Provinsi Riau secara menyeluruh. Dalam penelitian tentang *Dynamic Governance* dalam pengelolaan informasi publik, penting untuk menjelajahi perspektif dan pengalaman para pemangku kepentingan yang terlibat. Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk melakukan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana *Dynamic Governance* diimplementasikan dan dijalankan dalam pengelolaan informasi publik di Provinsi Riau.

Alasan penulis memilih topic penelitian ini adalah karena penulis ingin memahami sebuah teori secara holistic, hal ini didukung oleh penelitian skripsi penulis dengan teori yang sama namun dengan presentase 50% dari total keseluruhan analisis teori *Dynamic Governance*, maka dari itu penulis melanjutkan penelitian ini hingga tesis. Lokasi penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau, alasan memilih lokasi ini karena Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau, PPID Provinsi Riau, dan Komisi Informasi Provinsi Riau yang memiliki visi yaitu “Terwujudnya Layanan Komunikasi dan Informatika Yang Handal dan Berdaya Saing“ yang secara tidak langsung mendukung Visi Riau 2020, hal ini merupakan salah satu bentuk kegiatan mendukung pelaksanaan UU RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dimana Pemerintah Provinsi Riau berkewajiban untuk memberikan layanan informasi publik secara terbuka dan efisien kepada publik sehingga tercipta transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Seperti kita ketahui bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Peneliti menggunakan metode *purposive sampling* untuk menentukan *key informan* dan *Snowball Sampling* dalam menentukan informan selanjutnya hingga pertanyaan penelitian dianggap sudah terjawab. (Sugiyono, 2014). Informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris Diskominfo Provinsi Riau, Staff bidang sengketa publik Diskominfo Provinsi Riau, Staff PPID Utama Provinsi Riau, System Analyst PPID Provinsi Riau, Asisten Ahli Komisi Informasi Provinsi Riau, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau, dan Pemohon Informasi atau Termohon Sidang Sengketa Informasi Publik.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah triangulasi (Sugiyono, 2021) yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Serta menggunakan analisis analisis interaktif sebagaimana diungkapkan Miles dan Huberman (Sugiyono, 2021) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

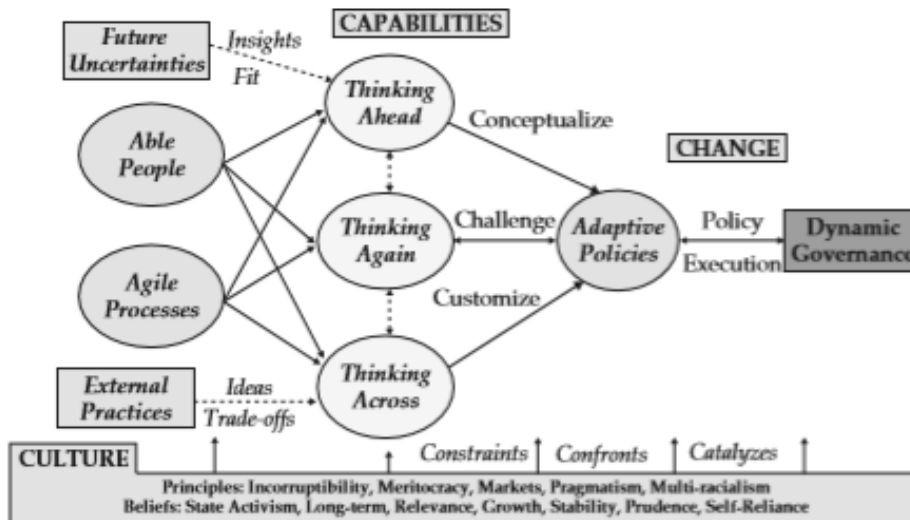
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Provinsi Riau mengadakan perlombaan siaran pers (Kab/Kota), media sosial, *Website*, media audiovisual dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) (Kab/Kota) bertajuk “Apresiasi Media Komunikasi Publik Provinsi Riau Tahun 2023” yang mana dapat diikuti oleh Dinas/Badan/Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Surat Komisi Informasi Pusat Nomor 038/KIP/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 tentang Hasil Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2019 disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau mendapat kategori Kualifikasi Informatif (rentang nilai 90-100). Dengan keberhasilan Provinsi Riau mendapat kategori Kualifikasi Informatif, Pemerintah Republik Indonesia memberikan piagam penghargaan yang diserahkan oleh Wakil Presiden kepada Pemerintah Provinsi Riau, yang dalam hal ini diwakili Wakil Gubernur Riau, didampingi Menteri Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dianalisis bahwa Forum Data Sektorial Provinsi Riau memiliki hubungan yang erat dengan pengelolaan informasi publik. Pemahaman Tentang Pentingnya Data melalui forum data sektorial, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan beberapa Instansi Vertikal yang terlibat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya data dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan daerah. Dalam forum ini, disampaikan sosialisasi tentang tugas dan fungsi Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau serta pentingnya data dalam mendukung pengambilan keputusan yang akurat dan berbasis fakta. Selain itu forum data sektorial memberikan kesempatan bagi berbagai OPD dan instansi vertikal untuk berkolaborasi dan berdiskusi dalam mengelola data sektorial. Melalui forum ini, tercipta koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam pengumpulan, pemutakhiran, dan pengelolaan data yang berkaitan dengan tupoksi masing-masing lembaga. Hal ini dapat memperkuat integritas dan kualitas data yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

Forum data sektorial juga mencakup pelatihan *capacity building* pengelolaan data geospasial. Dengan bantuan dari WRI Indonesia dan PPIG UNRI, Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau dapat meningkatkan sumber daya aparatur dalam bidang statistik dan data geospasial. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan data geospasial yang relevan dengan sektor-sektor tertentu di Provinsi Riau. Dalam konteks pengelolaan informasi publik, forum data sektorial membantu meningkatkan kualitas data yang tersedia untuk publik. Dengan koordinasi antarlembaga, pemahaman tentang pentingnya data, dan peningkatan kapasitas pengelolaan data geospasial, pengelolaan informasi publik di Provinsi Riau dapat didasarkan pada data yang akurat, terkini, dan dapat diandalkan. Hal ini akan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas informasi publik yang disediakan kepada masyarakat.

Gambar 1
Thinking Framework *Dynamic Governance*



Sumber : Neo and Chen (2007)

Dalam konteks indikator "*Thinking Ahead, Thinking Again, dan Thinking Across*" dalam pengelolaan informasi publik di Provinsi Riau, terdapat poin-poin penting yang berkaitan dengan Policy Choices (Pilihan Kebijakan), Execution (Pelaksanaan), Adaptation (Adaptasi), dan Innovation (Inovasi). Berikut adalah penjelasan mengenai poin-poin tersebut. Pertama, Policy Choices (Pilihan Kebijakan). Poin ini mencakup kemampuan Provinsi Riau untuk melakukan pemilihan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan dalam pengelolaan informasi publik. Provinsi Riau perlu melakukan analisis yang komprehensif terhadap kebutuhan publik, perkembangan teknologi, peraturan hukum, dan isu-isu terkini terkait pengelolaan informasi publik. Pilihan kebijakan yang baik akan membantu Provinsi Riau dalam menyusun arah dan tujuan yang jelas, serta mendorong praktik pengelolaan informasi publik yang efektif dan transparan.

Kedua, yaitu Execution (Pelaksanaan). Poin ini menyoroti pentingnya pelaksanaan kebijakan dengan baik dan efisien. Provinsi Riau memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan rencana. Hal ini melibatkan alokasi sumber daya yang memadai, koordinasi yang baik antar unit kerja, serta pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan yang baik akan memastikan bahwa kebijakan pengelolaan informasi publik di Provinsi Riau dapat memberikan manfaat yang diharapkan. Ketiga, yaitu adaptation (Adaptasi). Poin ini mencakup kemampuan Provinsi Riau untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam pengelolaan informasi publik. Provinsi Riau perlu mampu menyesuaikan kebijakan dan praktik pengelolaan informasi publik sesuai dengan perkembangan teknologi, tuntutan publik yang berubah, serta perubahan peraturan hukum terkait informasi publik. Kemampuan adaptasi yang baik akan memungkinkan Provinsi Riau untuk menjawab tantangan dan perubahan yang terjadi, serta tetap relevan dalam pengelolaan informasi publik. Keempat, yaitu Innovation (Inovasi). Poin ini menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan informasi publik di Provinsi Riau. Inovasi melibatkan penerapan teknologi baru, pengembangan metode kerja yang lebih efisien, serta adopsi praktik terbaik dalam pengelolaan informasi publik. Provinsi Riau perlu mendorong inovasi sebagai

respons terhadap tuntutan publik yang terus berkembang. Inovasi akan membantu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan aksesibilitas informasi publik di Provinsi Riau

Dengan memperhatikan poin-poin tersebut dalam indikator " *Thinking Ahead, Thinking Again, dan Thinking Across*", Provinsi Riau dapat melakukan pemilihan kebijakan yang tepat, melaksanakan kebijakan dengan baik, beradaptasi dengan perubahan, dan mendorong inovasi. Dalam konteks indikator " *Thinking Ahead, Thinking Again, dan Thinking Across*" dalam pengelolaan informasi publik di Provinsi Riau, terdapat poin-poin penting yang berkaitan dengan Agile Structure and System (Struktur dan Sistem yang Agil) serta Akuntabilitas dan Transparansi. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua poin tersebut.

Pertama, yaitu Agile Structure and System (Struktur dan Sistem yang Agil): Poin ini mencakup kemampuan Provinsi Riau dalam memiliki struktur organisasi dan sistem yang responsif dan adaptif terhadap perubahan dalam pengelolaan informasi publik. Struktur organisasi yang agil memungkinkan kolaborasi antar unit kerja, komunikasi yang efektif, dan pengambilan keputusan yang cepat. Sistem yang agil berarti memiliki teknologi, proses, dan alur kerja yang dapat dengan mudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan publik. Dengan adanya struktur dan sistem yang agil, Provinsi Riau dapat lebih responsif terhadap perubahan dan dapat mengelola informasi publik secara efisien. Kedua, yaitu, Akuntabilitas dan Transparansi. Poin ini menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan informasi publik di Provinsi Riau. Akuntabilitas berarti bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil dalam pengelolaan informasi publik. Provinsi Riau perlu memiliki mekanisme yang jelas untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi publik, termasuk pemantauan dan pelaporan yang efektif. Transparansi mengacu pada keterbukaan dan aksesibilitas informasi publik kepada publik secara jelas dan mudah diakses. Provinsi Riau harus memastikan bahwa informasi publik tersedia secara transparan dan dapat diakses dengan mudah oleh publik. Dengan adanya akuntabilitas dan transparansi yang kuat, Provinsi Riau dapat membangun kepercayaan publik, mencegah praktik korupsi, dan memastikan partisipasi publik yang lebih baik dalam pengelolaan informasi publik.

Dengan memperhatikan poin-poin tersebut dalam indikator " *Thinking Ahead, Thinking Again, dan Thinking Across* ", Provinsi Riau dapat membangun struktur dan sistem yang responsif, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan informasi publik. Hal ini akan membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan informasi publik di Provinsi Riau. Dalam konteks indikator " *Thinking Ahead, Thinking Again, dan Thinking Across* " dalam pengelolaan informasi publik di Provinsi Riau, terdapat poin-poin penting yang berkaitan dengan Able Leadership Recruitment (Rekrutmen Kepemimpinan yang Mampu), Pembaharuan, dan Retensi pada kepemimpinan. Berikut adalah penjelasan mengenai ketiga poin tersebut.

Pertama, yaitu Able Leadership Recruitment (Rekrutmen Kepemimpinan yang Mampu). Poin ini mencakup kemampuan Provinsi Riau dalam merekrut pemimpin yang memiliki kualitas dan kemampuan yang dibutuhkan dalam pengelolaan informasi publik. Rekrutmen pemimpin yang mampu melibatkan proses seleksi yang ketat untuk memastikan bahwa calon pemimpin memiliki pengetahuan yang luas tentang pengelolaan informasi publik, keterampilan kepemimpinan yang baik, integritas yang tinggi, dan komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi. Provinsi Riau perlu memiliki strategi rekrutmen yang efektif untuk menarik pemimpin yang berkualitas dalam pengelolaan informasi publik. Kedua, yaitu Pembaharuan (Renewal): Poin ini menyoroti pentingnya Provinsi Riau melakukan pembaharuan dalam

kepemimpinan terkait dengan pengelolaan informasi publik. Pembaharuan melibatkan adopsi kebijakan, praktik, dan teknologi baru yang relevan dengan perkembangan terkini dalam pengelolaan informasi publik. Provinsi Riau perlu mendorong pemimpin dan staf yang terlibat dalam pengelolaan informasi publik untuk terus belajar, mengikuti perkembangan terbaru, dan menerapkan inovasi dalam pekerjaan mereka. Pembaharuan yang kontinu akan memastikan bahwa Provinsi Riau dapat menjawab tantangan dan tuntutan baru yang muncul dalam pengelolaan informasi publik.

Dengan memperhatikan poin-poin tersebut dalam indikator "*Thinking Ahead, Thinking Again, dan Thinking Across*", Provinsi Riau dapat memastikan rekrutmen pemimpin yang mampu, melakukan pembaharuan yang sesuai dengan perkembangan, dan mempertahankan pemimpin yang berkualitas. Hal ini akan membantu Provinsi Riau dalam menghadapi perubahan, meningkatkan efektivitas kepemimpinan, dan memastikan kesinambungan pengelolaan informasi publik yang baik. Maka dari itu kondisi yang dinamis menyangkut proses lembaga yang secara konstan atau konsisten melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap lingkungan sosial-ekonomi di mana masyarakat, swasta dan pemerintah berinteraksi. Lembaga pemerintah yang dinamis ini mempengaruhi proses pembangunan ekonomi yang tengah berjalan dan beragam perilaku sosial melalui kebijakan-kebijakan, aturan-aturan dan struktur-struktur yang menciptakan insentif dan sekaligus pembatasan-pembatasan untuk beragam aktivitas yang berlangsung. Pada gilirannya, kemampuan ini akan dapat menopang dan memperkuat pembangunan dan kesejahteraan Negara (Neo & Chen, 2007).

Tabel 3

Analisis Dynamic Capability Pada Pengelolaan Informasi Publik Di Provinsi Riau

Capability Driver	Thinking Ahead	Thinking Again	Thinking Across
	1. Menggali dan mengantisipasi trend an perkembangan masa depan yang mungkin berdampak signifikan pada tujuan pengelolaan informasi public. 2. Memahami bagaimana perkembangan ini akan mempengaruhi realisasi tujuan saat ini dan menguji efektivitas strategi,	1.Melakukan tinjauan dan analisis kinerja actual dan umpan balik terhadap pemahaman OPD terkait pengelolaan informasi public yang baik. 2. Meninjau kembali kebijakan yang ada dan merencanakan aktivitas yang berdampak baik dalam peningkatan kualitas pelayanan informasi public. 3. Membuat,	1.Mencari dan mengadopsi praktik daerah lain dalam pengelolaan informasi public. 2. Mengamati dan melakukan evaluasi pengelolaan informasi publik. 3. Bagaimana kebijakan atau metode pelayanan dapat diterima oleh masyarakat.

MINISTRATE

	<p>kebijakan, dan rencana yang ada.</p> <p>3. Strategi yang disiapkan dalam mempersiapkan tantangan yang muncul.</p> <p>4. Mempengaruhi pengambilan keputusan terhadap pengelolaan informasi publik.</p>	<p>memperbaharui atau melaksanakan kebijakan yang lebih berdampak secara signifikan dalam transparansi informasi public.</p>	
<p>PATHS Policy Choices, Execution, Adaptation & Innovation</p>	<p>1. UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik</p> <p>2. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik</p> <p>3. Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 10 tahun 2014 tentang pelayanan publik</p> <p>4. Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 6 tahun 2015 tentang sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi dan keterbukaan</p> <p>5. SK Gubernur nomor. 307/iv/2018 tentang penetapan pengelola layanan informasi dan dokumentasi provinsi riau</p> <p>6. Peraturan Gubernur Riau nomor 17 tahun 2018 tentang pengelolaan ppid di lingkungan pemerintah</p>	<p>1. SK GUBERNUR Nomor. 778/Iv/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 307/Iv/2018 Tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Provinsi Riau</p> <p>2. Diskominfo Provinsi Riau membuat inovasi baru berbasis mobile application dan mendapatkan penghargaan (Innovation Government Award) dari Kemendagri</p> <p>3. OPD dibawah pemerintahan Provinsi Riau banya yang mengadopsi inovasi dari daerah lain, contohnya SPBE dan lainnya.</p>	<p>1. Membuat aplikasi PPID untuk pengguna android sebagai uji coba transformasi pelayanan menuju e-government.</p> <p>2. Melakukan evaluasi permohonan informasi publik yang di sengketa.</p> <p>3. Belum banyak masyarakat yang menggunakan aplikasi Lapir dalam proses permohonan informasi public.</p>

MINISTRATE

	provinsi riau		
<p>PROCESSES</p> <p>Agile Structure and System</p> <p>Akuntabilitas dan Transparansi</p>	<p>1.SOP PPID Provinsi Riau</p> <p>2.SK Standar Biaya Pelayanan</p> <p>3. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Riau Nomor 01 Tahun 2021</p> <p>4. PerKI tentang standar layanan informasi publik</p> <p>5.Memperbaharui model pelayanan mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan inovasi teknologi berbasis Website real time yang bisa memberikan akses penuh kepada masyarakat dlama memperoleh informasi publik maupun mengajukan permohonan</p>	<p>1. Tetap memberikan pelayanan secara konvensional dan menggunakan layanan elektronik secara bertahap agar masyarakat dapat membiasakan diri.</p> <p>2.Diskominfotik Riau dengan inovasi Layanan Elektronik Pengaduan TIK di lingkungan Pemprov Riau.</p> <p>3. Pelayanan informasi public dilakukan secara satu pintu, namun masih berupaya meningkatkan kualitas komunikasi PPID utama dengan PPID pelaksana agar dapat memproses permohonan informasi dari public dengan cepat.</p>	<p>1. Hasil penilaian KI Awards di Provinsi Riau belum di update di Website PPID Provinsi Riau</p> <p>2. Belum memaksimalkan</p>
<p>PEOPLE</p> <p>Able Leadership, Pembaharuan.</p>	<p>1.Pegawai sesuai kualifikasi dan keahlian dalam pengelolaan informasi public</p> <p>2. Menyediakan pelayanan yang cepat dengan adanya pegawai khusus mengawasi pelayanan melalui Website</p> <p>3. Seluruh kegiatan pengelolaan informasi public dibawah pengawasan Diskominfotik Provinsi</p>	<p>1.Melakukan pengawasan secara langsung dengan mengunjungi OPD di Provinsi RFiau secara berkala dalam pengelolaan informasi public oleh PPID pelaksana di daerah.</p> <p>2. OPD yang menangani komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota sebagian besar sudah mempunyai</p>	<p>1,Melakukan evaluasi trisemester terhadap informasi yang tidak bisa di akses masyarakat, atau informasi yang dikecualikan sesuai dengan hasil putusan siding dan aturan yang berlaku.</p> <p>2.Peran strategis Komisi Informasi dalam mengawal reformasi birokrasi agar pelayanan publik</p>

	Riau	nomenklatur yang sama	menjadi lebih baik. 3.Kurangnya Pemahaman Badan Publik Terhadap UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
--	------	-----------------------	--

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Tantangan Pengelolaan Informasi Public di Provinsi Riau

Tantangan pengelolaan informasi publik di Provinsi Riau dapat bervariasi, tergantung pada konteks sosial, politik, dan teknologi, hal ini dapat dilihat pada analisis berikut ini:

1. Transparansi dan aksesibilitas

Salah satu tantangan utama adalah memastikan transparansi dalam mengelola informasi publik dan memberikan akses yang mudah bagi masyarakat. Hal ini dapat melibatkan kebutuhan untuk meningkatkan proses pengungkapan informasi publik, mengurangi birokrasi, dan memastikan bahwa informasi tersebut tersedia dalam format yang mudah dipahami dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

2. Kesiapan PPID Pelaksana dalam menerima permohonan informasi publik.

Tantangan yang Anda sebutkan terkait dengan pengelolaan informasi publik di Provinsi Riau menggambarkan beberapa masalah yang umum dihadapi oleh unit Penyelenggaraan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menjalankan fungsi mereka. Berikut ini adalah elaborasi lebih lanjut mengenai tantangan tersebut. Pertama, yaitu kesiapan PPID dalam menerima permohonan informasi public. PPID memiliki peran penting dalam menerima, memproses, dan memberikan akses kepada publik terkait permohonan informasi publik. Tantangan yang mungkin dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem yang diperlukan untuk menangani permohonan secara efisien. Kekurangan dalam kapasitas tersebut dapat mempengaruhi kemampuan PPID dalam memberikan akses terhadap informasi publik secara tepat waktu. Kedua, yaitu komitmen yang rendah dalam memberikan informasi publik secara transparan. Komitmen yang rendah dari PPID dalam memberikan informasi publik secara transparan dapat menjadi tantangan utama dalam pengelolaan informasi publik di Provinsi Riau. Hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman akan pentingnya transparansi, kekhawatiran akan implikasi politik atau hukum, atau kurangnya dukungan dari pihak yang berwenang. Kekurangan komitmen ini dapat menghambat akses publik terhadap informasi yang seharusnya dapat diakses dengan mudah. Ketiga, yaitu sengketa informasi sebagai langkah pertama untuk mengakses informasi public

Tantangan lainnya adalah keberadaan sengketa informasi sebagai langkah pertama yang harus ditempuh oleh publik sebelum mengakses informasi publik. Idealnya, akses terhadap informasi publik haruslah transparan dan mudah, tanpa memerlukan proses sengketa yang memakan waktu dan sumber daya. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada ketidakefisienan atau kekurangan dalam sistem pengelolaan informasi publik di Provinsi Riau, baik dari segi proses permohonan maupun kebijakan yang mengatur akses informasi publik.

3. Koordinasi dan Kolaborasi

Dynamic Governance mendorong kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Namun, koordinasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga akademik dapat menjadi tantangan. Diperlukan mekanisme koordinasi yang jelas dan platform kolaboratif yang memfasilitasi komunikasi dan kerjasama antara pemangku kepentingan yang berbeda. Tantangan dapat timbul dalam mengubah atau menyusun ulang kerangka hukum dan kebijakan yang ada, serta memastikan konsistensi dan keselarasan di semua tingkatan pemerintahan.

4. Kesadaran dan literasi informasi

Tantangan lainnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya informasi publik dan meningkatkan literasi informasi. Masyarakat perlu memiliki pemahaman yang baik tentang hak-hak mereka dalam mengakses informasi publik, bagaimana menggunakan informasi tersebut, dan bagaimana membedakan antara informasi yang sah dan informasi yang salah atau manipulatif. Kampanye pendidikan dan pelatihan dapat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan literasi informasi di masyarakat.

5. Pemenuhan Sarana Prasarana PPID Utama

Pemenuhan sarana dan prasarana PPID Utama di Provinsi Riau menyoroti masalah infrastruktur fisik yang belum memadai. Berikut adalah elaborasi lebih lanjut mengenai tantangan tersebut. Pertama, yaitu keterbatasan sarana dan prasarana: Tantangan utama adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PPID Utama di Provinsi Riau. Gedung PPID yang tergabung dalam kantor Diskominfo Provinsi Riau yang belum diperbaiki mungkin menyebabkan kurangnya ruang khusus dan fasilitas yang sesuai untuk pelayanan PPID. Ketidmaksimalan sarana dan prasarana ini dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas kerja PPID dalam memproses permohonan informasi publik. Kedua, yaitu ketidakefektifan pusat pelayanan informasi: Karena keterbatasan sarana dan prasarana, pusat pelayanan informasi terbesar di Provinsi Riau kesulitan dalam bekerja secara optimal. Kurangnya ruangan khusus dan fasilitas yang dibutuhkan dapat menghambat operasional PPID dan memberikan pengaruh negatif pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan informasi publik. Ketiga, yaitu penundaan perbaikan gedung PPID Utama: Fakta bahwa perbaikan gedung PPID Utama belum dilakukan selama dua tahun sejak pemindahan kantor Diskominfo Provinsi Riau mencerminkan tantangan dalam hal perencanaan, anggaran, atau prioritas penggunaan sumber daya. Penundaan perbaikan ini dapat memperpanjang periode di mana PPID harus beroperasi dalam kondisi yang kurang memadai. Keempat, yaitu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau menempati 4 gedung, yaitu gedung utama terletak di kawasan kantor gubernur untuk 4 bidang yakni Sekretariat, bidang Informasi dan Komunikasi Publik, bidang Infrastruktur e- Government, dan bidang Statistik. Bidang Layanan e-Government berada di lantai dasar gedung Menara Lancang Kuning, bidang Persandian berkantor di kawasan kediaman Gubernur Riau, jalan Diponegoro, satu lagi Komisi Informasi yang berada di jalan Gajah Mada, 1 gedung untuk 3 komisi (Komisi Pemilihan Umum, Komisi Informasi, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau).

Kesimpulan

Provinsi Riau sudah melakukan pengelolaan informasi public dengan baik mengikuti aturan dan SOP yang berlaku, dari pandangan PPID selaku pengelola informasi public utama di Daerah, Diskominfo Provinsi Riau selaku Dinas yang menjadi PPID utama pada pelaksanaan pelayanan informasi public dan mengintegrasikan informasi dari OPD ke public, serta KI sebagai pengawa sekaligus wadah dalam menyelesaikan sengketa informasi public yang dilakukan secara transparan dan dapat di akses secara daring oleh masyarakat. Bentuk *Dynamic Governance* pada pengelolaan informasi public di Provinsi Riau sudah berhasil di implementasikan dengan baik, hal ini terbukti dari hasil analisis indikator *Culture*, *Capabilities*, dan *Change* yang membawa dampak baik pada pengelolaan informasi public yang lebih transparan dan mudah di akses oleh publik. Tantangan pada pengelolaan informasi publik di Provinsi Riau adalah Transparansi dan aksesibilitas berkelanjutan, Kesiapan PPID Pelaksana dalam menerima permohonan informasi public, koordinasi dan kolaborasi, kesadaran literasi public, serta sarana prasarana yang belum maksimal.

References

- Adyaksana, R. I., & Alqurani, L. (2020). Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Transparansi Dan Akuntabilitas. *Journal Of Business And Information Systems (E-Issn: 2685-2543)*, 2(2), 85–94. <https://doi.org/10.36067/Jbis.V2i2.74>
- Bannister, F., & Connolly, R. (2011). The trouble with transparency: a critical review of openness in e-government. *Policy & Internet*, 3(1), 1-30.
- Baybeck, B., Berry, W. D., & Siegel, D. A. (2011). A strategic theory of policy diffusion via intergovernmental competition. *The Journal of Politics*, 73(1), 232-247. doi:10.1017/S0022381610000988
- Benawan, E. T. P., Saerang, D. P. E., & Pontoh, W. (2018). Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04). <https://doi.org/10.32400/Gc.13.03.19995.2018>
- Chandrarin, G. (2017). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Salemba Empat: Jakarta Selatan.
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design* Edisi 4. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dewanti, D. A. (2014). Di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu *Ejournal Ilmu Pemerintahan. Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 2140–2150.
- Elkha, F., & Wahidawati. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–19.
- Faedlulloh, D. (2021). Birokrasi, Disrupsi, Dan Anak Muda: Mendorong Birokrat Muda Menciptakan *Dynamic Governance*. *Jurnal Transformative*, 7(1), 112-127.
- Faizah, N. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Riau (Studi Kasus Defisit Apbd Riau Tahun 2018). In *Skripsi* (Vol. 3). Universitas Muhammadiyah Riau.

- Gilardi, F. (2016). *Four ways we can improve policy diffusion research. State Politics & Policy Quarterly*, 16(1), 8-21. doi:10.1177/1532440015608761
- Hanida, R. P., Irawan, B., & Rozi, F. (2021). *Dynamic Governance Capabilities In Regional Budget Policy Formulation To Create Agile Bureaucracy During Covid-19. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 5(1), 79-97.
- Huseini, M. (2015). *Merekonstruksi Indonesia: sebuah perjalanan menuju Dynamic Governance*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI: Yogyakarta.
- Mayarni, M. (2020). *Kapabilitas Dynamic Governance Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pemberlakuan New Normal Di Masa Pandemi Covid19. Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 8(2), 145-167.
- Neo, B. S., & Chen, G. (2007). *Dynamic Governance: Embedding Culture, capabilities and Change in Singapore*. World Scientific Publishing: Singapore.
- Rahmatunnisa, M. (2019). *Dialektika konsep Dynamic Governance. Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 2(02).
- Rachmiatie, A., Ahmadi, D., & Khotimah, E. (2015). *Dinamika Transparansi Dan Budaya Badan Publik Pasca Reformasi Birokrasi (Studi Kasus tentang Badan Publik se-Indonesia sebagai Badan Publik Perspektif UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14/2008 di Propinsi Jabar dan Kalbar). Sosiohumaniora*, 17(3), 264-268.
- Shkabatur, J. (2013). *Transparency With (Out) Accountability: Open Government In The United States. Yale Law & Policy Review*, 31(1), 1-66.
- Subhan, A. (2017). *Pelaksanaan Transparansi Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Jaringan*. Universitas Padjadjaran: Bandung.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta: Bandung.
- Tarigan, J. S. (2020). *Dynamic Governance Dalam Pencegahan Korupsi (Studi Kasus: Penyusunan Apbd Kota Malang Tahun 2020)*. (Doctoral Dissertation, Universitas Brawijaya). <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/182053/>
- Umar, Z., Syawalina, C. F., & Khairunnisa, K. (2018). *Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja instansi inspektorat Aceh. Kolegial*, 6(2), 136-148.
- Uphoff, N. (2022). *Development Professionalism. In Revolutionizing Development (pp. 249-255)*. Routledge.
- Vani, R. V., Habibie, D. K., & Maryani, M. (2020). *Dynamic Governanc E Pekanbaru City In Policy Implementation About The New Normal In Pandemic Covid-19 Era. In Iapa Proceedings Conference (Pp. 173-193)*.